

KEMITRAAN STRATEGIS ANTARA VIETNAM-AMERIKA SERIKAT DALAM BIDANG KEAMANAN: PERSPEKTIF VIETNAM

Nur Azizah¹

Abstract: Vietnam and the United States have forged a comprehensive partnership for nearly ten years with nine areas of cooperation, one of which is security. Cooperation in the security sector is established because it deals with issues of the legacy of war and the involvement of the two countries in conflicts in the South China Sea. The United States' alignment with Vietnam in the South China Sea conflict made the United States offer to increase strategic partnerships to further strengthen relations between the two. This study aims to determine Vietnam's perspective regarding its consideration of an offer to increase strategic partnership relations with the United States. This research is a descriptive qualitative research. Data collection was carried out by library research using secondary data. The results of this study show Vietnam's consideration of the United States offer to enhance partnerships based on internal and external influences, such as maintaining the principles of its national defense and maintaining good relations with China in the midst of the South China Sea conflict.

Keywords: Strategic Partnership, Vietnam, United States

Abstrak: Vietnam dan Amerika Serikat telah menjalin kemitraan komprehensif selama hampir sepuluh tahun dengan sembilan bidang kerja sama, salah satunya keamanan. Kerja sama di bidang keamanan terjalin karena menangani masalah warisan perang serta terlibatnya kedua negara dalam konflik di Laut Tiongkok Selatan. Keberpihakan Amerika Serikat terhadap Vietnam dalam konflik Laut Tiongkok Selatan membuat Amerika Serikat menawarkan peningkatan kemitraan menjadi strategis untuk lebih mempererat hubungan keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Vietnam mengenai pertimbangannya terhadap tawaran peningkatan hubungan kemitraan menjadi strategis dengan Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertimbangan Vietnam terhadap tawaran Amerika Serikat untuk meningkatkan kemitraan berdasarkan pengaruh internal dan eksternal, seperti mempertahankan prinsip pertahanan negaranya dan menjaga hubungan baik dengan Tiongkok di tengah konflik Laut Tiongkok Selatan.

Kata Kunci: Kemitraan Strategis, Vietnam, Amerika Serikat

Pendahuluan

Vietnam dan Amerika Serikat melakukan normalisasi hubungan diplomatik setelah terjadi kerenggangan karena Perang Vietnam pada tahun 1955. Normalisasi hubungan dilakukan pada 11 Juli 1995 antara Presiden Bill Clinton dan Perdana Menteri Vo Van Kiet (Ted Osius, 2021). Sebelumnya, kedua negara terlibat perang selama 20 tahun pada 1955 hingga 1975 karena Amerika Serikat berupaya menghentikan penyebaran ideologi komunis ke Vietnam dengan menggunakan militernya yang berakhir dengan kekalahan Amerika Serikat. Perang Vietnam menyebabkan terjadi kerenggangan selama 20 tahun sebelum kemudian hubungan bilateral kembali terjalin dan dibangun secara pelan-pelan dan bertahap. Jalanan kerja

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: nurajjo2801@gmail.com.

sama antara kedua negara dibuka dengan kerja sama ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi Vietnam dan membuka pintu perdagangan internasional dengan negara-negara lain. Perjanjian Perdagangan Bilateral Vietnam dan Amerika Serikat memberikan izin terhadap produk Vietnam untuk memasuki pasar Amerika Serikat.

Selain bidang ekonomi, kerja sama keamanan juga terjalin atas dasar penyelesaian warisan perang dan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan mendapatkan protes dari beberapa negara yang wilayahnya termasuk didalam klaim tersebut. Negara-negara tersebut adalah Brunei Darussalam, Filipina, Taiwan, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Mendapat tanggapan negatif, Tiongkok berupaya mengamankan Laut Tiongkok Selatan dengan mengerahkan militernya. Vietnam menjadi negara paling *vocal* dalam mengajukan protes kepada Tiongkok karena Pulau Spratly dan Pulau Paracel yang diklaim oleh Tiongkok adalah miliknya (Winanda Kusuma et al, 2021). Tidak hanya Vietnam, Amerika Serikat juga melibatkan diri dalam konflik tersebut untuk mempertahankan pengaruhnya di Asia. Menghadapi kekuatan militer Tiongkok, Vietnam dan Amerika Serikat pun menjalin kerja sama pertahanan keamanan.

Hubungan kedua negara semakin menguat dengan dibentuknya kemitraan komprehensif pada tahun 2013 antara Presiden Barack Obama dan Presiden Truong Tan Sang. Kemitraan komprehensif merupakan sebuah kemitraan yang menyeluruh untuk memajukan kerja sama kedua negara melalui sembilan bidang kerja sama, salah satunya keamanan (White House, 2013). Lalu di tahun 2017, antara Presiden Donald Trump dan Presiden Tran Dai Quang memperbaharui kemitraan komprehensif dengan memperkuat kerja sama keamanan (White House, 2017). Sepanjang tahun 2013-2017, kemitraan komprehensif kedua negara berkembang dengan kemajuan yang signifikan. Hal tersebut membuat Amerika Serikat menawarkan peningkatan kemitraan menjadi strategis kepada Vietnam yang disampaikan oleh Wakil Presiden Kamala Harris pada tahun 2021 saat kunjungan ke Vietnam. Namun, Vietnam tidak memberikan jawaban persetujuan maupun penolakan dan menekankan pada pendalaman kemitraan komprehensif. Padahal, dengan meningkatkan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat, Vietnam akan mendapat bantuan dalam menjaga wilayah maritim Vietnam terutama menghadapi militer Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

Tulisan ini adalah sebuah upaya untuk menjelaskan hubungan kemitraan antara Vietnam dan Amerika Serikat yang terjalin sejak tahun 2013 serta menjabarkan perspektif Vietnam terhadap tawaran Amerika Serikat mengenai peningkatan status kemitraan dari komprehensif menjadi strategis.

Kerangka Teori

Dalam penelitian ini menggunakan dua konsep, antara lain konsep regionalisme dan konsep keuntungan relatif dalam menganalisis permasalahan penelitian.

1. Konsep Regionalisme

Menurut Jens Uwe Wunderlich, regionalisme merupakan suatu proses yang melibatkan interaksi antar negara dalam kawasan tertentu dengan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai, norma, tujuan, gagasan, dan masyarakat internasional (Jens Uwe Wunderlich, 2007). Proses interaksi terjadi dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan satu sama lain meliputi kerja sama ekonomi, keamanan, politik dan kerja sama di bidang lainnya melalui berbagai dialog dan kesepakatan.

Konsep regionalisme memiliki perspektif-perspektif lainnya dalam menjawab permasalahan yang terjadi dalam lingkup regional, salah satunya perspektif fungsionalisme. David Mitrany menjelaskan bahwa perspektif fungsionalisme menekankan pada penciptaan badan atau lembaga internasional yang bersifat fungsional dalam menangani masalah internasional di suatu kawasan (Jens Uwe Wunderlich, 2007). Lembaga atau badan internasional yang terbentuk akan menjalankan peran tertentu dalam kondisi tertentu dan sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan lembaga tersebut diperlukan dan dibutuhkan untuk menjadi wadah dalam proses interaksi negara-negara yang bekerja sama dalam sektor-sektor tertentu. Kerja sama yang terjalin tidak hanya terjadi di satu sektor saja, namun akan berkembang ke sektor-sektor lain karena adanya tekanan untuk menciptakan kerja sama yang lebih banyak, ini disebut sebagai proses *spillover* atau limpahan fungsional (Jens Uwe Wunderlich, 2007).

Proses *spillover* dalam lingkup regional akan dimulai dengan terciptanya integrasi ekonomi yang kemudian membutuhkan integrasi-integrasi lainnya seperti politik, sosial budaya, keamanan, atau sektor lainnya untuk menjaga arus kerja sama yang terjalin. *Spillover* dapat digambarkan dengan “situasi dimana tindakan tertentu dengan tujuan tertentu, akan menciptakan situasi dimana tujuan awal akan dilaksanakan dengan tindakan lebih lanjut, sehingga menciptakan kondisi lebih lanjut dan kebutuhan untuk tindakan lebih lanjut dan seterusnya” (Jens Uwe Wunderlich, 2007).

2. Konsep Keuntungan Relatif

Keuntungan relatif merupakan keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dengan upaya maksimal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari kerja sama yang terjalin (Robert Jackson dan George Sorensen, 2014). Keuntungan relatif ini menekankan pada terjadinya ketidaksetaraan keuntungan. Bagi kaum neorealis, keuntungan relatif menjadi masalah dan penting untuk diperhatikan dalam hubungan kerja sama karena akan menciptakan kesenjangan keuntungan di antara mitra yang bekerja sama.

Joseph Grieco menjelaskan bahwa negara akan menolak untuk bergabung atau membatasi keterlibatan kerja sama yang terjalin jika negara tersebut percaya bahwa mitranya akan mendapatkan keuntungan relatif yang lebih besar (Joseph Grieco, 1988). Permasalahan keuntungan relatif menjadi fokus negara-negara karena berpotensi menjadikan mitra sebagai musuh yang kuat di masa depan. Neorealis memandang terhadap permasalahan keuntungan relatif ini sebagai bentuk bertahan hidup dalam hubungan internasional yang tidak pasti sehingga negara-negara berupaya untuk bersikap defensif dalam hubungan internasional. Hal tersebut terjadi karena negara tidak dapat memastikan apakah mitra yang saat ini menjalin kerja sama akan terus menjadi mitra atau dapat berubah menjadi musuh di masa depan (Robert Powell, 1991). Tidak hanya Joseph Grieco, Robert Powell juga menyatakan bahwa adanya kesenjangan keuntungan tersebut dapat menyebabkan suatu negara lebih memilih untuk tidak menjalin kerja sama karena kekhawatiran terhadap keuntungan yang lebih besar yang akan diperoleh oleh mitranya (Robert Powell, 1991).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menjelaskan hubungan Vietnam dan Amerika Serikat di bawah kerangka kemitraan komprehensif serta memberikan penjabaran mengenai perspektif Vietnam atas peningkatan kemitraan menjadi strategis yang ditawarkan oleh Amerika Serikat dengan menggunakan

pendekatan kualitatif. Data sekunder yang didapatkan melalui internet antara lain sumber resmi, jurnal, artikel, dan *e-book*. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Kemitraan Komprehensif antara Vietnam dan Amerika Serikat

Republik Sosialis Vietnam merupakan negara komunis dengan Partai Komunis yang menjadi partai tunggal berkuasa sehingga dalam memegang kendali terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan (Country Reports, 2022). Urusan penyelenggaraan kebijakan luar negeri dilaksanakan dengan prinsip multilateralisasi melalui jalinan kerja sama di berbagai sektor dengan berbagai negara, salah satunya Amerika Serikat.

Penyelesaian warisan perang yang berdampak terhadap Vietnam membuka kerja sama keamanan pertahanan bagi kedua negara seperti mengatasi dampak dioksin agent orange, menjinakkan bom yang belum meledak serta penanganan tahanan perang (*prisoner of war*) dan tentara AS yang hilang saat perang (*missing in action*). Penyelesaian warisan perang menjadi bentuk tanggung jawab serta upaya Amerika Serikat untuk membangun rasa saling percaya antara kedua negara yang pernah terlibat perang sebagai musuh. Hubungan keamanan berkembang dengan kerja sama bantuan bencana, penyelamatan, dan bantuan medis serta kunjungan kapal perang Angkatan Laut AS ke pelabuhan Vietnam pada tahun 2003-2008 untuk menunjukkan terutama kepada masyarakat Vietnam bahwa keduanya sudah menjalin hubungan secara normal (CNN, 2003). Tidak hanya itu, kepemimpinan Presiden Barack Obama yang melakukan strategi kebijakan luar negeri di Asia-Pasifik memberikan peluang besar untuk hubungan yang lebih erat dengan Vietnam, terutama bidang keamanan. Pembahasan mengenai keamanan regional terutama permasalahan di Laut Tiongkok Selatan semakin memperkuat hubungan keduanya dalam upaya menjaga maritim Vietnam dan mencapai kebebasan navigasi di kawasan tersebut.

Hubungan pertahanan antara Vietnam dan Amerika Serikat mencapai puncaknya ketika Dialog Pertahanan Kedua yang dilakukan pada 19 September 2011 menghasilkan penandatanganan *Memorandum of Understanding Advancing Bilateral Defense Cooperation* yang mencakup lima bidang yaitu: pembentukan dialog tingkat tinggi antara kementerian pertahanan; memfokuskan pada keamanan maritim; melakukan latihan pemeliharaan perdamaian; pencarian dan penyelamatan; serta kerja bantuan kemanusiaan dan bencana (Carlye Thayer, 2013).

Hubungan bilateral Vietnam dan Amerika Serikat mengalami perkembangan yang signifikan ditandai dengan pembentukan kemitraan komprehensif di Gedung Putih pada tahun 2013 antara Presiden Barack Obama dan Presiden Truong Tan. Kemitraan komprehensif yang dibentuk merupakan sebuah jalinan kerja sama yang menyeluruh dalam rangka memajukan hubungan kedua negara di segala bidang. Terdapat sembilan bidang kerja sama di bawah kerangka kemitraan komprehensif ini diantaranya: kerja sama politik dan diplomatik, perdagangan dan ekonomi, sains dan teknologi, pendidikan, lingkungan dan kesehatan, menangani warisan perang, pertahanan dan keamanan, perlindungan hak asasi manusia, budaya, pariwisata dan olahraga. Bidang pertahanan dan keamanan menjadi salah satu bidang yang menjadi fokus kedua negara. Di bawah kerangka kemitraan komprehensif ini, kerja sama keamanan ditingkatkan seperti terorisme, penegakan terhadap hukum maritim, penanganan kejahatan bersifat transnasional, kejahatan di dunia maya, serta memberantas perdagangan manusia, satwa

liar, mapupun narkoba (The White House, 2013). Amerika Serikat juga memberikan bantuan senilai 18 juta dolar kepada Vietnam untuk meningkatkan kapabilitas patroli pantai Vietnam.

Pada tahun 2017, Vietnam dan Amerika Serikat kembali melakukan *Joint Statement* untuk memperbaharui dan memperluas kerja sama dilakukan di Hanoi pada 11-12 November 2017 antara Presiden Donald Trump dan Presiden Tran Dai Quang. Bidang keamanan mengalami perluasan kerja sama antara lain keamanan regional, keamanan maritim, operasi pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, serta warisan perang (US Embassy & Consulate in Vietnam, 2017). Peningkatan kehadiran militer Tiongkok disertai dengan tindakan agresif terhadap kapal-kapal yang bukan berbendera Tiongkok menyebabkan masalah keamanan regional dan keamanan maritim di kawasan Laut Tiongkok Selatan menjadi fokus baru dalam kemitraan komprehensif ini. Untuk itu Amerika Serikat mengirimkan kapal penjaga pantai kelas Hamilton yang menunjukkan dukungannya terhadap Vietnam. Dengan begitu, Vietnam dan Amerika Serikat menegaskan bahwa penyelesaian terkait konflik Laut Tiongkok Selatan harus dilakukan dengan cara-cara damai berdasarkan hukum internasional dan menyerukan implementasi penuh atas *Code of Conduct* (COC).

Memperkuat hubungan dengan Vietnam menjadi tujuan Amerika Serikat yang dilakukan dengan upaya untuk meningkatkan status kemitraan dari komprehensif menjadi strategis. Pada tahun 2021, Wakil Presiden AS Kamala Harris melakukan kunjungan ke Vietnam untuk bertemu dengan Presiden Nguyen Xuan Phuc. Dalam pertemuan tersebut, Kamala menyatakan perlu adanya pertimbangan untuk meningkatkan kemitraan menjadi strategis. Menanggapi hal tersebut, Presiden Nguyen Xuan Phuc menyatakan ingin memperdalam kemitraan komprehensif serta menguatkan kepercayaan diantara kedua negara sehingga menjadi landasan dalam kerja sama yang terjalin (Thanh Hu, 2021). Pada akhirnya, Vietnam dan Amerika Serikat kembali melakukan *Joint Statement* penguatan kemitraan komprehensif. Penguatan kerja sama keamanan direalisasikan dengan penyediaan kapal penjaga pantai kelas Hamilton yang ketiga, 24 kapal, melakukan peningkatan fasilitas dermaga dan pangkalan, serta melakukan pelatihan penegakan hukum (White House Government, 2021).

Hierarki diplomatik Vietnam membagi tiga tingkatan kemitraan yaitu kemitraan strategis yang komprehensif, kemitraan strategis, dan kemitraan komprehensif menempati posisi terendah. Keinginan untuk meningkatkan kemitraan menjadi strategis oleh Amerika Serikat sudah disampaikan sebanyak tiga kali sejak tahun 2010 oleh Hillary Clinton, tahun 2021 oleh Kamala Harris, dan 2022 oleh Menteri Luar Negeri AS Marc Knapper. Namun, tawaran tersebut hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan persetujuan dari pihak Vietnam sehingga kemitraan komprehensif masih menjadi status kemitraan kedua negara.

B. Regionalisme di Asia Tenggara dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan

Konflik di Laut Tiongkok Selatan berdampak pada ekonomi, stabilitas kawasan, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara sehingga organisasi regional ASEAN sangat diperlukan untuk segera mengambil langkah mengatasi hal tersebut. Adanya ASEAN menunjukkan regionalisme di Asia Tenggara yang dibutuhkan perannya dalam konflik Laut Tiongkok Selatan mengingat bahwa anggota-anggotanya yang terlibat. Peran ASEAN dalam menangani konflik ini dilakukan dengan menyediakan forum untuk dialog antara ASEAN dan Tiongkok serta mengeluarkan

beberapa deklarasi yang berkaitan dengan tindakan di Laut Tiongkok Selatan. Adapun peran ASEAN antara lain *Declaration on the South China Sea* (1992), *Declaration of Conduct of the Parties in the South China Sea* (2002), *Joint Working Group on South China Sea* (2005), *Guidelines for the Implementation of the DOC* (2011), *ASEAN's Six Points Principle* (2012), *First Reading of the Single Draft Negotiating Text of COC* (2019), *Senior Officials's Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (2021). Berbagai pertemuan dan deklarasi tersebut menjadi upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam menyelesaikan konflik. Menjaga hubungan baik dengan Tiongkok selama penyelesaian konflik sangat perlu diperhatikan mengingat negara-negara anggota ASEAN yang juga bergantung pada ekonomi Tiongkok.

Fungsi ASEAN dalam menjalankan perannya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan dilakukan oleh *ASEAN Political-Security Community* (APSC). Pembentukan APS dimaksudkan agar terjadi percepatan dalam kerja sama politik dan keamanan tanpa membentuk aliansi. APSC memiliki *blueprint* yang mencakup tindakan-tindakan dalam menanggapi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan seperti melakukan konsultasi diantara negara-negara terkait DOC dan COC, mengintensifkan dialog antara ASEAN-Tiongkok, mengawasi implementasi COC, menyerukan untuk tidak menggunakan kekuatan dalam proses penyelesaian konflik, serta menahan diri untuk tidak bertindak sepihak yang dapat meningkatkan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan (Blueprint APSC, 2009).

ASEAN menciptakan badan yang lebih fungsional dalam menangani politik keamanan di Asia Tenggara yaitu APSC. Integrasi keamanan yang terbentuk di bawah payung APSC menunjukkan proses *spillover* yang dilakukan oleh ASEAN. Limpahan fungsional dalam ASEAN sangat diperlukan dalam menangani konflik Laut Tiongkok Selatan terutama untuk implementasi COC. Berdasarkan konsep regionalisme perspektif fungsionalisme, bahwa konflik di Laut Tiongkok Selatan menciptakan situasi yang memerlukan tindakan lebih lanjut agar tujuan ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan terwujud, melalui pembentukan badan fungsional APSC serta berbagai mekanisme lainnya sesuai kebutuhan.

C. Tindakan Tiongkok, Vietnam, dan Amerika Serikat dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan

Tiongkok berupaya untuk mendapatkan kontrol atas Laut Tiongkok Selatan dengan mengerahkan militer maritimnya. Tujuan yang ingin dicapai Tiongkok adalah negara-negara yang mengajukan klaim atas wilayah Laut Tiongkok Selatan menerima klaim nine dash line Tiongkok (Oriana Skylar Mastro, 2020). Militer maritim Tiongkok terus ditingkatkan melalui pembentukan penjaga pantai yang memiliki 200 kapal dan pesawat serta memiliki *Zhatou Class Cutter* atau dikenal sebagai kapal penjaga pantai terbesar di dunia. Tiongkok juga membentuk milisi maritim sebagai kekuatan pendukung yang memiliki fasilitas kapal-kapal nelayan dan kapal milisi khusus dalam menjaga wilayah Laut Tiongkok Selatan. Angkatan Laut Tiongkok bahkan memiliki wewenang untuk menyerang, memaksa, memblokade, serta menduduki pulau-pulau kecil lalu mengubah pulau-pulau tersebut menjadi pangkalan militer.

Menanggapi tindakan agresif dari militer maritim Tiongkok, Vietnam melakukan upaya-upaya seperti peningkatan kemampuan militer melalui pembentukan penjaga pantai dan milisi maritim, mempersiapkan jalur hukum, melakukan dialog

secara kolektif bersama dengan ASEAN, serta menjalin kerja sama keamanan dengan negara-negara besar salah satunya Amerika Serikat. Adapun tindakan Amerika Serikat dalam keterlibatannya di konflik Laut Tiongkok Selatan ini adalah bertindak sebagai hegemon atau pelindung tatanan regional (Huiyun Feng dan Kai He, 2018). Amerika Serikat melakukan operasi kebebasan navigasi secara rutin, melakukan pengintaian di atas Laut Tiongkok Selatan, serta mendukung negara-negara penuntut dengan menjalin kerja sama keamanan.

D. Perspektif Vietnam terhadap Kemitraan Strategis dengan Amerika Serikat di Bidang Keamanan

Hubungan Vietnam dan Amerika Serikat sejak normalisasi hingga sekarang menunjukkan dua hal. Pertama, keduanya berupaya menciptakan hubungan yang lebih baik setelah menjadi musuh dalam Perang Vietnam. Kedua, baik Vietnam maupun Amerika Serikat saling berupaya untuk meningkatkan kekuatan rasa saling percaya satu sama lain. Bahkan hubungan keduanya semakin diperkuat dengan jalinan kemitraan komprehensif yang sudah berjalan hampir sepuluh tahun. Namun, disaat Amerika Serikat sudah menawarkan peningkatan kemitraan menjadi strategis sebanyak tiga kali, Vietnam belum menunjukkan keinginan untuk meningkatkan kemitraan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, Vietnam memiliki pertimbangan internal dan eksternal mengenai tawaran dari Amerika Serikat. Berikut pertimbangan Vietnam terhadap tawaran peningkatan kemitraan strategis dari Amerika Serikat.

1. Mempertahankan Prinsip Pertahanan Four No's

Vietnam memiliki prinsip pertahanan four no's yang berisi "*tidak bergabung dengan aliansi militer apapun, tidak memihak satu negara untuk melawan negara lain, tidak mengizinkan negara lain untuk mendirikan pangkalan militer atau menggunakan wilayah Vietnam untuk melakukan kegiatan militer untuk melawan negara lain, dan tidak menggunakan kekuatan atau mengancam menggunakan kekuatan dalam hubungan internasional*". Berdasarkan prinsip tersebut, Vietnam memberikan penegasan tidak akan memiliki aliansi dengan negara manapun, tidak akan memihak satu negara dalam hal ini Amerika Serikat untuk melawan Tiongkok, serta tidak akan menggunakan kekuatan dalam upaya penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan. Prinsip ini menjadikan Vietnam sebagai negara yang netral.

Peningkatan kemitraan akan memberikan peluang bahwa Vietnam dan Amerika Serikat akan terlibat dalam kerja sama keamanan pertahanan yang lebih kuat terutama dalam menjaga maritim Vietnam. Bantuan dana untuk modernisasi militer Vietnam akan lebih banyak diberikan, *transfer* kapal dengan teknologi canggih dari Amerika Serikat, atau bahkan terjadinya latihan angkatan laut yang lebih intens dalam meningkatkan kapabilitas militer maritim Vietnam. Tindakan-tindakan tersebut tentu saja memberikan sinyal kepada Tiongkok bahwa Vietnam sedang bersiap melawannya. Jika itu terjadi, agresivitas militer Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan akan semakin meningkat. Oleh karena itu, Vietnam mempertimbangkan untuk meningkatkan kemitraan menjadi strategis dengan lebih memilih mempertahankan prinsip pertahanan negaranya untuk membatasi hubungan militer dengan Amerika Serikat. Pembatasan kerja sama terutama dalam hubungan keamanan ataupun militer karena Vietnam memandang bahwa Amerika Serikat akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

2. Menjaga Hubungan Baik dengan Tiongkok

Berdasarkan pertimbangan Vietnam, peningkatan kemitraan hanya akan menyebabkan kesenjangan keuntungan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat akan

memiliki mitra kuat dalam menghadapi Tiongkok mengingat Vietnam sebagai negara terdepan yang mengajukan protes klaim Laut Tiongkok Selatan. Tidak hanya itu, Amerika Serikat akan memiliki pendukung kuat dalam mempertahankan dominasinya di Asia Tenggara. Sedangkan Vietnam, dengan melakukan peningkatan hanya akan memperburuk hubungan baik dengan Tiongkok. Bagi Vietnam, Tiongkok tetap menjadi prioritas dalam kebijakan luar negerinya karena keduanya telah menjalin kemitraan strategis yang komprehensif serta berbagi model pembangunan ekonomi dan politik. Vietnam berupaya untuk menjaga hubungannya dengan Tiongkok sebagai kawan yang baik, mitra yang baik, teman yang baik, dan tetangga yang baik. Agresivitas militer Tiongkok merupakan hal yang sangat dihindari oleh Vietnam karena berdampak pada hubungan keduanya serta menghambat penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan terutama implementasi COC. Selain itu, menurut pertimbangan Vietnam, bahwa status dari kemitraan tidaklah menjadi penting dibandingkan dengan isi substansi dari kemitraan itu sendiri.

Kesimpulan

Dinamika hubungan bilateral Vietnam dan Amerika Serikat yang dibangun secara pelan-pelan dan bertahap bahkan membentuk sebuah kemitraan yang menunjukkan perkembangan signifikan dari jalinan kerja sama antara kedua negara. Kemitraan komprehensif yang terjalin hampir sepuluh tahun dengan terus mengalami perluasan dan pembaharuan semakin memperkuat komitmen kedua negara untuk menjadi lebih dekat setelah menjadi musuh di masa lalu. Permasalahan warisan perang dan konflik di Laut Tiongkok Selatan mendorong kerja sama keamanan yang lebih erat. Bahkan, ASEAN ikut mengambil peran dalam menangani konflik Laut Tiongkok Selatan dengan mengedepankan cara-cara damai.

Tawaran peningkatan kemitraan oleh Amerika Serikat yang tidak mendapat persetujuan ataupun penolakan didasarkan pada adanya pertimbangan Vietnam terhadap hal tersebut. Pertimbangan tersebut seperti mempertahankan prinsip pertahanan *four no's* dan memilih untuk menjaga hubungan baik dengan Tiongkok. Pespektif Vietnam didasarkan pada akan terjadi kesenjangan keuntungan relatif antara kedua negara dimana Amerika Serikat mendapatkan mitra kuat di Asia Tenggara dalam menghadapi Tiongkok sedangkan Vietnam hanya akan memburuk hubungan baiknya dengan Tiongkok.

Daftar Pustaka

- An Ke, Chien. The Strategic Implications of US and Russian Arms Sales in Vietnam: Maintaining Regional Stability and Security. *Jurnal Fuxinggang* edisi 113. <https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?docid=04298063-201812-201812200003-201812200003-27-50>
- Asia Report N318. "Vietnam Tacks Between Cooperation and Struggle in the South China Sea". International Crisis Group, 2021. <https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/china/318-vietnam-tacks-between-cooperation-and-struggle-south-china-sea>
- Brands, Hal & Cooper, Zack. "Getting Serious About Strategy In The South China Sea". US Naval War College Review 71, no. 1. <https://digitalcommons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=nwc-review>
- Deng, Ping. "Relative Gains Problem and Case Studies of Economic Cooperation in East Asia". *Dissertation*, https://digitalcommons.odu.edu/gpis_etds/43/

- Embassy of Socialist Republic of Vietnam. “*President Clinton Welcomed in Vietnam*”, <https://vietnamembassy-usa.org/relations/president-clinton-welcomed-vietnam>
- Grieco, Joseph M. “*Anarchy and the limits of cooperation: a realist critique of the new liberal institutionalism*”, <https://doi.org/10.1017/S0020818300027715>
- Hang, Nguyen Thi Thuy. “US Vietnam Comprehensive Partnership: Present and Possible”. *The Journal of International Relations, Peace Studies, and Development* Vol. 4, Iss. 1, Article 10, https://scholarworks.arcadia.edu/agsjournal/vol4/iss1/10?utm_source=scholarworks.arcadia.edu%2Fagsjournal%2Fvol4%2Fiss1%2F10&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages,
- Jackson, Robert dan Sorensen, George. *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan edisi kelima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. “*Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN*”, https://kemlu.go.id/portal/id/read/121/halaman_list_lainnya/masyarakat-politik-keamanan-asean
- Osius, Ted. “*Nothing Is Impossible: Americas’s Reconciliation with Vietnam*”. New Brunswick: Rutgers University Press, 2021.
- Powell, Robert. “*Absolute and Relative Gains in International Relations Theory*”, <https://doi.org/10.2307/1963947>
- Thayer, Carlye A. “Vietnam’s Strategy of ‘Cooperating and Struggling’ with China over Maritime Disputes in The South China Sea”. *Journal of Asian Security and International Affairs* 3, no. 2. <https://www.jstor.org/stable/48601796>
- The White House. “*Joint Statement by President Barack Obama of the United States of America and President Truong Tan Sang of the Socialist Republic of Vietnam*”, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/07/25/joint-statement-president-barack-obama-united-states-america-and-president>
- Thu, Thanh. “*Historic US visit lays fresh paths for stronger relations*”, <https://vir.com.vn/historic-us-visit-lays-fresh-paths-for-stronger-relations-87167.html>
- US Embassy & Consulate in Vietnam. *Bilateral Trade Agreement*. <https://vn.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/bilateral-trade-agreement/>
- US Department of State. “*US Security Cooperation with Vietnam*” <https://2017-2021.state.gov/u-s-security-cooperation-with-vietnam-2/>
- Winanda, Kusuma et al. *South China Sea: Conflict, Challenge, and Solution*. *Lampung Journal of International Law* 3, no. 1 (2021). <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/lajil/article/view/2266>
- WH Gov. “*Fact Sheet: Strengthening the US-Vietnam Comprehensive Partnership*”, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/08/25/fact-sheet-strengthening-the-u-s-vietnam-comprehensive-partnership/>